

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholders* (pemangku kepentingan) menjelaskan kepada siapa saja perusahaan bertanggung jawab. Teori ini juga menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemilik modal (*shareholders*) saja, melainkan juga bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan, internal maupun eksternal. Pihak-pihak yang dimaksud disini seperti masyarakat, pelanggan, pesaing, pemasok, pemerintah, bank, dan lain sebagainya.

Tanggung jawab yang dimiliki perusahaan tidak hanya untuk memaksimalkan laba yang ingin diperoleh, melainkan juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, pelanggan, dan juga pemasok yang merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para *stakeholders* yang berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang perlu dukungan dari para *stakeholders*. Maka dari itu, para *stakeholders* membutuhkan informasi mengenai perusahaan yang terkait dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan.

Setiap perusahaan akan berusaha untuk memberikan informasi yang berintegritas supaya para *stakeholders* tetap mendukung kegiatan perusahaan dan juga menaruh kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Melalui pengungkapan *sustainability report* diharapkan perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap, tidak hanya dari sektor keuangan saja melainkan dari sektor non keuangan yang berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori *stakeholders*. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Deegan (dalam Ulum, 2017) dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan.

Perjanjian sosial yang ada di antara perusahaan dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan mengkonsumsi sumber daya merupakan hal yang mendasari teori legitimasi pula. Menurut pandangan teori ini, perusahaan akan terdorong untuk menunjukkan seluruh kegiatannya dalam laporannya terutama dalam bidang non keuangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh legitimasi dari publik. Pengakuan legitimasi publik ini menjadi penting bagi perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan sosial perusahaan.

Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat, maka legitimasi perusahaan akan terancam. Omran dan El-Galfy (dalam Ulum, 2017) menyebutkan bahwa untuk bisa menutup gap legitimasi, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang ada di dalam kontrolnya dan mengidentifikasi publik yang relevan yang memiliki kekuatan untuk memberi legitimasi kepada perusahaan. Pengungkapan aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan melalui pengungkapan *sustainability report* yang bisa meningkatkan legitimasi perusahaan. Hal ini dikarenakan *sustainability report* mengungkapkan aspek non keuangan yang dapat memenuhi tuntutan transparansi informasi sehingga gap antara nilai masyarakat dan nilai perusahaan bisa berkurang.

2.1.3 Konsep *Triple Bottom Line*

Perusahaan yang selama ini hanya berorientasi untuk mendapatkan laba yang tinggi, akhir-akhir ini mulai beralih juga untuk mulai memperhatikan kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan dan sosialnya. Beralihnya orientasi tersebut merupakan usaha yang dilakukan manajer perusahaan untuk mencapai pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*). Dalam pencapaian hal tersebut, perusahaan sejalan dengan konsep yang sering disebut konsep *triple bottom line*. Konsep ini menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan, tidak hanya dari sektor ekonomi, melainkan juga dari sektor sosial dan lingkungan di tempat sekitar perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya.

Istilah *triple bottom line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul "*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Elkington mengembangkan konsep *Triple Bottom Line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. Perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memerhatikan konsep "3P", yaitu:

1) *Profit*

Profit merupakan unsur yang paling penting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Fokus utama dari seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan adalah mengejar *profit*. *Profit* sendiri adalah tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dan berkembang.

2) *People*

Perusahaan harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan manusia atau masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kegiatan operasional perusahaan. Masyarakat di sekitar perusahaan

adalah salah satu *stakeholder* penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dukungan dari masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan sehingga perusahaan akan selalu berupaya untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, sehingga jika perusahaan ingin tetap mempertahankan usahanya, perusahaan perlu menyertakan tanggung jawab perusahaan yang bersifat sosial.

3) *Planet*

Salah satu hal yang mendukung kelangsungan hidup perusahaan adalah lingkungan. Perusahaan harus mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Dengan melestarikan lingkungan, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kenyamanan dan ketersediaan sumber daya yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

2.1.4 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan jenis laporan sukarela yang bersifat non keuangan dan mengungkapkan tiga jenis kinerja yaitu kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Sustainability report diungkapkan sebagai bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan pengembangan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, pengungkapan laporan berkelanjutan sangatlah penting bagi para *stakeholders* maupun perusahaan sebagai pelengkap laporan keuangan serta tambahan informasi tentang kegiatan perusahaan.

2.1.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

a. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode tertentu yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Dalam laporan posisi keuangan, terdapat informasi material dan sangat berguna untuk berbagai pihak seperti *stakeholders*, akademisi, dan berbagai pihak lainnya guna menentukan kebijakan. Laporan posisi keuangan terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi diartikan sebagai laporan keuangan yang termasuk dalam rangkaian siklus akuntansi yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu yang didalamnya menyajikan seluruh unsur pendapatan dan beban perusahaan yang akan menghasilkan kondisi sebenarnya laba bersih atau rugi bersih perusahaan. Laporan ini dapat mengecek efisiensi dan efektivitas usaha berdasarkan pada nilai biaya usaha.

c. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas pada perusahaan akibat dari kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode tertentu.

Laporan ini erat kaitannya dengan laporan laba rugi karena laba bersih yang diperoleh perusahaan akan menambah akun ekuitas. Atau sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi bersih otomatis akan mengurangi akun ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas dapat disusun setelah adanya laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

d. Laporan arus kas

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas menghasilkan kas dan setara kas serta penggunaannya. Informasi arus kas mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Dengan demikian, laporan arus kas melaporkan dampak operasi, transaksi investasi, dan transaksi pendanaan terhadap kas, sehingga dapat dilihat peningkatan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama satu periode. Penyajian laporan arus kas merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, melunasi kewajiban, dan membagikan dividen kepada para investor.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan dan kebijakan akuntansi yang digunakan suatu perusahaan. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Perusahaan dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis sepanjang dianggap praktis, untuk membantu pengguna memahami dan membandingkan laporan keuangan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya.

Berdasarkan informasi dalam laporan keuangan tersebut, pengguna dapat menilai kinerja perusahaan dalam mengelola sumber daya, sehingga mereka dapat membuat keputusan ekonomi tentang keberlangsungan kegiatan perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang disusun tersebut memenuhi kebutuhan bersama

sebagian besar pengguna, namun laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi karena laporan keuangan secara umum hanya menggambarkan dampak keuangan dari kejadian lampau dan tidak perlu menyajikan informasi nonkeuangan. Oleh karena itu, untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif, akhir-akhir ini perusahaan juga lebih dituntut untuk mengungkapkan informasi nonkeuangannya.

2.1.6 Kinerja Keuangan

Dalam penentuan pengambilan keputusan oleh para *stakeholders*, mereka memerlukan informasi terkait dengan kinerja perusahaan yang tersaji dalam laporan keuangan. Kinerja baik buruknya suatu perusahaan dapat diketahui dari analisis kinerja keuangan perusahaan. Analisis kinerja keuangan digunakan perusahaan untuk melakukan evaluasi atas kegiatan operasional yang telah dilakukan pada suatu periode tertentu agar perusahaan dapat terus bertahan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis rasio.

Informasi mengenai kinerja keuangan sangat berguna bagi pihak internal perusahaan (manajemen) serta bagi para *stakeholders*, terutama para investor. Bagi manajemen, informasi kinerja keuangan dapat menjadi ukuran prestasi yang dicapai pada periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilannya serta dapat menjadi dasar penentuan strategi. Sedangkan untuk investor, informasi kinerja keuangan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasinya.

Mengingat adanya biaya untuk mengungkapkan kegiatan di bidang sosial dan lingkungan, kinerja keuangan juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, karena tidak semua perusahaan menyediakan anggaran tersendiri untuk pembuatan laporan tersebut. Jika perusahaan ingin mengungkapkan informasi kegiatan non keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan diikuti pengeluaran untuk pengungkapan yang dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh perusahaan. Apabila perusahaan ingin mempertahankan eksistensinya di mata para *stakeholder*, salah satu cara yang

dapat dilakukan oleh perusahaan adalah mengungkapkan *sustainability report* meskipun perusahaan perlu membentuk rancangan anggaran tersendiri untuk pengungkapan laporan tersebut.

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan perhitungan rasio-rasio keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kondisi keuangan maupun kinerja suatu perusahaan. Rasio keuangan didapatkan berdasar perbandingan antara data-data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan. Rasio pengukuran kinerja keuangan yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas dan rasio *leverage*.

2.1.6.1 Profitabilitas

Dalam melakukan analisis kinerja keuangan terdapat beberapa pengukuran yang dapat digunakan, salah satunya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba selama beberapa periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimiliki perusahaan. Rasio ini biasanya dapat digunakan sebagai penilaian bagi investor dan kreditur untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor serta besaran laba yang dihasilkan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya yang dapat memperlihatkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.

Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat menunjukkan bahwa perusahaan bisa memenuhi harapan dari para *stakeholders*. Informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan khususnya profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial dalam hal sumber daya ekonomi yang kemungkinan akan dikendalikan di masa datang. Kemampuan perusahaan untuk menciptakan profit yang tinggi dari aset yang dimiliki akan memunculkan kesadaran perusahaan akan pentingnya mengungkapkan aktivitas sosial, lingkungan, dan ekonomi. Apabila kesadaran tersebut didorong dengan ketersediaan perusahaan membentuk anggaran tersendiri untuk mengungkapkan kegiatan tersebut, maka

perusahaan akan mempertimbangkan untuk membuat *sustainability report*. Dari laporan tersebut, akan memunculkan pandangan bahwa perusahaan berpeluang untuk menjadi perusahaan *going concern*.

2.1.6.2 Leverage

Menurut Hadiningsih (dalam Jannah, 2016) menyebutkan bahwa *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi. Rasio ini membandingkan antara jumlah utang perusahaan secara menyeluruh dengan aset atau ekuitasnya. Dengan rasio *leverage*, dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki suatu perusahaan.

Kemampuan manajemen mengelola dana dalam hal pembiayaan aset perusahaan juga dapat dilihat melalui rasio *laverage*. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi, maka perusahaan tersebut sangat tergantung pada pihak luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan jika perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah, maka perusahaan tersebut lebih banyak membiayai asetnya dari modal sendiri ketimbang dari pihak lain.

2.1.7 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Menurut FCGI (*Forum Corporate Governance Indonesia*) *good corporate governance* (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. GCG juga bisa menjadi salah satu alat untuk mendapatkan kepercayaan dari *stakeholders* serta para investor yang ingin menginvestasikan hartanya di suatu perusahaan. Organ utama perusahaan terdiri dari:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada dewan direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam perseroan terbatas dan pemegang segala kewenangan yang tidak diserahkan dewan komisaris dan dewan direksi, seperti menyetujui pengajuan permohonan agar perusahaan tersebut dinyatakan pailit; mengubah anggaran dasar; mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direksi maupun dewan komisaris; menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas; menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan; serta membubarkan perseroan. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perseroan terbatas. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan dengan perserujuan dari anggota RUPS yang kemudian dilaporkan kepada menteri hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan komisaris. Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, yaitu komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen risiko, dan lain-lain. Pembentukan beberapa komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi *corporate governance* yang baik di perusahaan.

c. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah dewan yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan. Dewan direksi dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan terbatas. Dewan direksi dapat bertindak sebagai pengawas dan juga pengendali di suatu perusahaan. Dewan direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, dewan direksi juga perlu menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Menurut Gede Raka, salah seorang panel ahli dari *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), menyatakan dalam GCG tersirat secara implisit bahwa sebuah perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan penerapan *corporate governance* yang baik, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata *stakeholders* serta memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan. Dengan hal tersebut, perusahaan jadi semakin sadar akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders* maupun dengan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Kepedulian perusahaan terhadap hal tersebut dapat diungkapkan melalui pengungkapan *sustainability report*. Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai pengukuran *corporate governance* yaitu komite audit dan dewan direksi.

2.1.7.1 Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu tugas dari dewan komisaris mengawasi jalannya perusahaan. Salah satu bentuk penerapan *corporate governance* yang baik pada perusahaan, yaitu salah satunya dengan adanya pembentukan komite audit. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)

mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit bertugas berdasarkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada suatu perusahaan tersebut.

Tujuan pembentukan komite audit pada umumnya adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, *auditing* serta sistem pengendalian lainnya, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar. Hal-hal yang patut dan harus dilaporkan kepada komite audit, seperti kelemahan dalam pengendalian internal, perbedaan pendapat dengan manajemen, pengaruh dari kebijakan akuntansi tertentu, dan hambatan dalam melakukan audit. Untuk itu diperlukan adanya saluran terbuka dan kontinyu terhadap komite audit agar bertindak sebagai mediator antara para pemegang saham, manajemen, dan pihak eksternal perusahaan.

Tanggung jawab komite audit di bidang *corporate governance* adalah memberikan kepastian bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya. Komite audit juga perlu mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat memengaruhi kinerja finansial maupun kinerja non finansial perusahaan.

2.1.7.2 Dewan Direksi

Peran dewan direksi dalam penerapan *corporate governance* yang baik dirasa menjadi hal yang penting bagi perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa dewan direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar. Dalam penerapan dan pelaksanaan *corporate governance* yang baik, sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dipercaya sebagai pihak yang mengurus perusahaan.

Dewan direksi dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Salah satu tugas dan tanggung jawab dewan direksi yaitu melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik untuk kepentingan perusahaan, dan memastikan perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya, serta memperhatikan kepentingan para *stakeholders* perusahaan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang praktik pengungkapan laporan berkelanjutan atau *sustainability report* telah mengalami banyak perkembangan dan perluasan variasi jenis variabel. Penelitian praktik laporan berkelanjutan berpacu standar yang dikemukakan dan dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Berikut ini beberapa penelitian terdahulu mengenai pengungkapan laporan berkelanjutan.

Sari dan Marsono (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Variasi variabel yang digunakan antara lain : profitabilitas, likuiditas, *leverage*, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi, dan dewan komisaris independen. Hasil penelitian yang dihasilkan yaitu bahwa komite audit dan dewan komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Profitabilitas mempunyai pengaruh yang negatif dalam *sustainability report*. Sedangkan hasil dari likuiditas, *leverage*, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan dewan direksi

menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid (2015) mencoba mengetahui tentang bagaimana pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Beberapa variabel yang digunakan adalah dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, *governance committee*, profitabilitas, dan juga *leverage*. Hasil penelitian ini adalah variabel komite audit, *governance committee* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Variabel dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

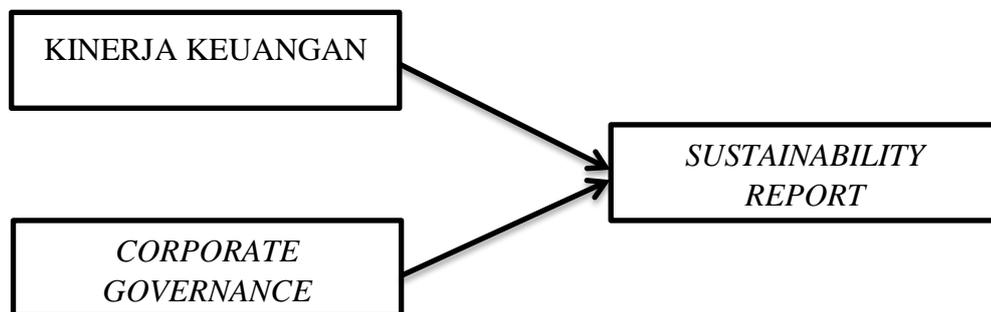
Jannah (2016) juga melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan di BEI. Variabel yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan aktivitas perusahaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. *Leverage* dan aktivitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Aliniar dan Wahyuni (2017) meneliti tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan terdaftar di BEI. Variabel yang digunakan yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan kepemilikan saham institusional mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Nasir, Ilham, dan Utara (2014) mencoba menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar. Variabel yang digunakan yaitu profitabilitas, likuiditas, *leverage*, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi, dan *governance committee*. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa likuiditas, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, dan dewan direksi menunjukkan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan profitabilitas, *leverage*, dan *governance committee* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, maka model konseptual penelitian dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Konseptual Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Kinerja keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberi kesan yang baik terhadap para *stakeholders* terutama bagi investor dan kreditor. Salah satu yang menjadi ukuran yaitu dengan melihat rasio profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin baik pula cara manajemen mengelola perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menciptakan profit yang tinggi dari

aset yang ada akan memahami pentingnya pengungkapan aktivitas sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan yang dapat diungkapkan melalui *sustainability report*.

Penelitian yang dilakukan Nasir, Ilham, dan Utara (2014) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal sama juga diungkapkan oleh Jannah (2016) yang menemukan hubungan positif antara profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 = Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dapat menggunakan rasio *leverage*. Semakin tinggi *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Untuk tetap dapat dipercaya oleh para kreditor, perusahaan perlu melaporkan tingkat laba yang tinggi dengan mengurangi biaya-biaya termasuk dengan biaya yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan perusahaan di bidang sosial dan lingkungan. Untuk mengungkapkan *sustainability report* perusahaan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang relatif besar. Hal tersebut dapat mengurangi tingkat pengungkapan laporan yang bersifat sukarela, salah satunya pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan argumen diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 = *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.4.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu mengawasi jalannya perusahaan. Selain itu, pembentukan

komite audit juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi *corporate governance* yang baik di perusahaan. Pembentukan komite audit ini diharapkan bahwa perusahaan mampu menerbitkan laporan yang lengkap dan berintegritas tinggi dengan menerbitkan laporan yang tidak saja laporan *mandatory* (wajib), tetapi juga laporan *voluntary* (sukarela) yaitu pengungkapan *sustainability report*. Maka, hipotesis yang diajukan yaitu:

H3 = Komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.4.4 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Keberhasilan perusahaan dalam penerapan *corporate governance* yang baik tergantung dewan direksi yang menjalankan serta mengawasi kegiatan perusahaan. Semakin baik *corporate governance* yang digunakan perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi perusahaan. Tidak hanya informasi mengenai kinerja keuangan saja, melainkan informasi tentang kegiatan sosial perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan. Kepedulian terhadap kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, dapat diungkapkan melalui *sustainability report*. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H4 = Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.